



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKHWANUDDIN HARAHAP
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN KERJASAMA
3. NHK : 853219

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.790.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 354 m2/186 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 362 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 585 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **194.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU ROCKY Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA NC12AC SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	260.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	216.245.622
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.460.745.622
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.460.745.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.